

**ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI
PAGUYUBAN MITRA NELAYAN SEJAHTERA
JUWANA KABUPATEN PATI**

Ayu Novita Sari, Retna Hanani

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
E-mail : fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Community empowerment in the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana is an effort to accommodate fishermen who own purse seine vessels with a gross tonnage (GT) of more than 30. This study aims to analyse the empowerment of coastal communities, particularly fishermen who own purse seine vessels in the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Kabupaten Pati. This study uses a qualitative descriptive method. The data sources in this study were obtained from interviews, observations, and documentation. The informant selection technique was carried out using purposive sampling. Data analysis was conducted using the empowerment theory perspective. The results of the study show that the empowerment of fishermen who own boats in the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana has gone through three stages, including raising awareness among the fishing community of the problems or threats they face, enhancing the capacity of individual fishermen and fishing groups through discussion, education, knowledge transfer, and strengthening communication for policy advocacy that supports the sustainability of the fishing business, as well as increasing the empowerment of members in political, economic, and social aspects. The driving factors in the empowerment at the Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana are the motivation of members to join, the availability of sufficient funds from member contributions to cover operational costs, and the availability of adequate facilities and infrastructure. Meanwhile, the factors hindering empowerment activities are government policies in the form of laws, regulations, and directives from the central government that are not adaptive to the real conditions of fishermen who own boats.

Keywords : Coastal communities, Boat-owning fishermen, Stages of empowerment

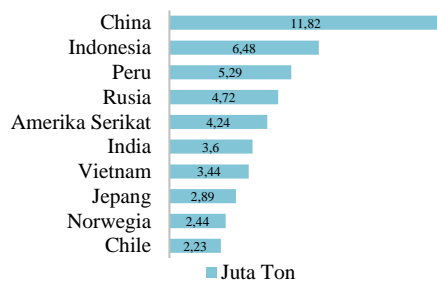
ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana merupakan upaya yang dilakukan untuk mewartahi nelayan pemilik kapal *purse seine* dengan ukuran di atas 30 GT (*gross tonnage*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya nelayan pemilik kapal *purse seine* di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perspektif teori pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan pemilik kapal di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana sudah melalui tiga tahapan, antara lain penumbuhan kesadaran dalam diri masyarakat nelayan akan permasalahan atau ancaman yang dihadapi, peningkatan kapasitas individu dan kelompok nelayan melalui proses diskusi, edukasi, transfer pengetahuan, dan penguatan komunikasi untuk advokasi kebijakan yang menunjang keberlangsungan bisnis usaha perikanan tangkap, serta peningkatan keberdayaan anggota baik dari aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Faktor pendorong dalam pemberdayaan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera adalah motivasi yang dimiliki anggota untuk bergabung, adanya anggaran dari iuran anggota yang mencukupi operasional, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sementara faktor penghambat kegiatan pemberdayaan adalah kebijaksanaan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, regulasi, dan arahan Pemerintah Pusat yang kurang adaptif dengan kondisi riil nelayan pemilik kapal.

Kata kunci : Masyarakat pesisir, Nelayan pemilik kapal, Tahapan pemberdayaan

PENDAHULUAN

Perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi (Mardyani & Yulianti, 2020). Potensi perikanan Indonesia cukup fantastis didasari pada letak geografis yang strategis di sekitar garis khatulistiwa serta diapit oleh Samudera Hindia dan Samudra Pasifik, menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati laut atau mega biodiversity (Heriza & Mulianingsih, 2023).



Gambar 1. Volume Produksi Perikanan Tangkap Global 2022

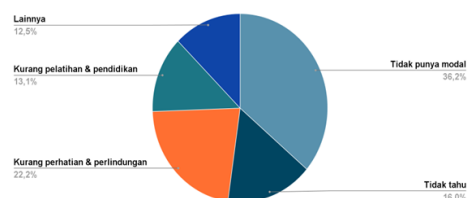
Sumber: databoks.katadata.co.id, 2024

Data yang diperoleh dari laporan Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2022 menunjukkan volume produksi perikanan tangkap laut global mencapai 79,7 juta ton. Indonesia

menempati peringkat kedua dengan hasil tangkapan sebesar 6,84 juta ton atau setara dengan 8,6% dari total

produksi global. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam berupa hasil laut yang melimpah.

Potensi perikanan di Indonesia sangat luar biasa, tetapi permasalahan mendasar mengenai kontribusi sektor kelautan dan perikanan yang masih tergolong rendah. Hal tersebut berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat nelayan (Heriza & Mulianingsih, 2023). Kehidupan masyarakat pesisir terutama nelayan identik dengan permasalahan kemiskinan (Abidin, 2017).



Gambar 2. Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan

Sumber: [Kompas.com](https://www.kompas.com), 2022

Kemiskinan masyarakat nelayan bersifat multidimensi yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya tidak memiliki modal, kurang mendapatkan perhatian atau perlindungan dari pemerintah, kurangnya pelatihan maupun pendidikan, tidak mengetahui alasannya, dan lain-lain. Keterbatasan pada kepemilikan modal membatasi nelayan untuk berkembang. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kurangnya perhatian pemerintah untuk melindungi masyarakat nelayan dari ancaman ekonomi maupun lingkungan.

Goodwin (dalam Utama & Wahyuni, 2016) mengemukakan bahwa faktor kapital menjadi faktor yang dominan dalam menentukan posisi nelayan. Semakin besar penguasaan kapital, maka semakin besar pula kesempatan untuk memberi pengaruh pada kebijakan publik. Kekuatan kapital atau nominal memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan politik, hukum, dan sosial (Utama & Wahyuni, 2016).

Masyarakat nelayan sudah melekat dengan stigma kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mubyarto et. al. dalam Nugroho (2015) menjelaskan bahwa masyarakat pesisir atau nelayan selalu identik dengan kebodohan dan keterbelakangan. Pendapat ini didukung oleh penelitian Abidin (2017) yang menyebutkan bahwa masyarakat nelayan sering disebut kelompok termiskin di antara yang miskin (*the poorest of the poor*). Berkembang stereotip bahwa wilayah pesisir umumnya dihuni oleh masyarakat bertaraf ekonomi rendah dan keadaan lingkungan yang kumuh serta terbelakang (Nugroho, 2015).

Pendapat tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat pesisir di Desa Bendar di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Mayoritas masyarakat Desa Bendar berprofesi sebagai nelayan memiliki tingkat kesejahteraan menengah hingga menengah ke atas Sa'idah et al. (2024). Berdasarkan penelitian Sa'idah, dkk. (2024), kondisi permukiman nelayan Desa Bendar menunjukkan tingginya tingkat

perekonomian masyarakatnya, serta tempat tinggal yang cukup elite.

Tabel 1. Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Pati Tahun 2017-2019

No.	TPI	Jumlah Produksi (Rp.)		
		2017	2018	2019
1.	TPI Unit 1 Juwana	46.702.000.000	36.249.000.000	77.356.000.000
2.	TPI Unit 2 Juwana	588.268.500.000	208.974.840.000	446.741.304.000
3.	Pecangan Bajomulyo	631.788.200	357.894.100	635.449.600
4.	Margomulyo Tayu	537.422.600	296.789.400	453.232.200
5.	Sambiroto Tayu	346.935.200	218.368.000	418.244.600
6.	Alasdowo Dukuhseti	453.288.800	258.228.000	451.692.000
7.	Banyutowo Dukuhseti	6.640.384.820	2.582.335.000	4.110.936.000
8.	Puncel Dukuhseti	5.367.914.000	2.464.307.000	5.249.238.000
	Jumlah	648.948.233.620	251.401.761.500	535.416.096.400

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2021

Hal tersebut diperkuat oleh data nilai produksi perikanan laut tertinggi pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit I dan Unit II Juwana. Kedua TPI ini terletak Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana yang berdekatan dengan Desa Bendar. Jumlah produksi yang tinggi menandakan adanya aktivitas penangkapan ikan secara besar-besaran yang dilakukan oleh nelayan di Kecamatan Juwana. Oleh karena itu, perekonomian nelayan di Kecamatan Juwana dapat dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan TPI lain di Kabupaten Pati.

Masyarakat nelayan umumnya digambarkan sebagai kelompok marginal yang tidak berdaya dan lemah dalam sisi politis, atau tidak mampu memberi pengaruh pada kebijakan publik. Kondisi ini berbeda dengan komunitas nelayan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana yang telah melakukan advokasi kebijakan melalui diskusi, lobi, dan demonstrasi. Aksi demonstrasi digelar dengan membagikan 120 ton ikan hasil tangkapan ketika acara car free day (CFD) di Alun-alun Pati sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang menghambat nelayan untuk berkembang.

Berbagai kajian ilmiah menyoroti persoalan masyarakat nelayan yang cenderung identik dengan ketidakberdayaan dan berkepanjangan. Beberapa permasalahan tersebut belum mendapatkan solusi sehingga menjadi tantangan bagi keberlangsungan mata pencaharian nelayan. Dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh

masyarakat nelayan, diperlukan upaya untuk melakukan perubahan.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan saat ini dalam menciptakan perubahan tersebut adalah pemberdayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pasal 1 Ayat 8, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemberdayaan yang dilakukan Paguyuban MNS Juwana bukan memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan pemilik kapal, tetapi mencakup usaha untuk memberdayakan anggota yang kurang mampu dalam mengakses sumber-sumber politik. Hal ini mendorong terwujudnya kegiatan advokasi kebijakan dalam menghadapi tantangan kebijakan pemerintah yang dapat dilihat dengan meningkatnya *bargaining position*

nelayan di pemerintahan. Nelayan yang sukses dapat menjadi model bagi rekan-rekan nelayan lainnya yang masih berkubang dengan masalah serupa.

Penelitian ini membatasi kajiannya terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan melalui komunitas atau kelompok yang diinisiasi dan dibentuk oleh nelayan sendiri dengan fokus analisis pada Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana yang terletak di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan gambaran tahapan yang dilakukan oleh Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana dalam melakukan rangkaian pemberdayaan. Maka dari itu, pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana Kabupaten Pati. Peneliti juga melakukan analisis terhadap faktor yang mendorong dan menghambat dalam pemberdayaan masyarakat

pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana Kabupaten Pati

KAJIAN TEORI

a. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *'empowerment'*, berarti 'pemberkuasaan'. Istilah ini berakar dari kata 'daya' merujuk pada kekuatan dan kemampuan. Konsep ini memotong lingkaran setan yang menghubungkan *power* dengan pembagian kesejahteraan. Adanya peniadaan kekuatan pada sebagian besar masyarakat mengakibatkan ketiadaan akses produktif yang dimiliki oleh kalangan yang berkuasa (Yulistiana, 2022).

Pemberdayaan ini berkaitan dengan kemampuan untuk berpartisipasi, mendapatkan kesempatan, dan mengakses sumber daya layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Sumodiningrat dalam Hamid (2018), pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk

memandirikan masyarakat melalui penggalan potensi yang dimiliki individu atau kelompok, kemudian mulai mengembangkannya.

Menurut Sulistiyani (2004), tujuan pemberdayaan adalah mewujudkan kemandirian individu dan masyarakat dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan tindakan mereka (Nawalah et al., 2012). Proses belajar diperlukan untuk mencapai kemandirian ini, sehingga masyarakat secara bertahap dapat mengembangkan kemampuan mereka.

b. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dilihat dalam berbagai tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan, sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan respons dari masyarakat. Pada penelitian Suwandi & Prihatin (2020) di KUB Berkah Samudera Jepara, teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) berkembang sesuai dengan karakteristik nelayan. Proses pemberdayaan masyarakat

nelayan tersebut terdiri dari beberapa tahapan berupa:

1. Penumbuhan kesadaran dalam diri masyarakat nelayan

Kesadaran individu adalah modal awal untuk mendorong partisipasi aktif kelompok nelayan. Pembentukan kesadaran terbagi menjadi tiga proses yang menyertainya, meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan.

2. Peningkatan kapasitas individu dan kelompok sebagai penunjang keberdayaan

Upaya peningkatan kapasitas adalah langkah untuk mengadakan pertemuan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemberdayaan kelompok nelayan.

3. Peningkatan keberdayaan yang berkelanjutan

Tahap keberdayaan adalah proses kemandirian dilihat dari bagaimana masyarakat nelayan sebagai subjek pemberdayaan mampu dan berani mengambil keputusan, mengolah sumber daya secara optimal, serta

membangun jaringan tanpa bergantung dengan pihak eksternal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai bagaimana keadaan terkait pemberdayaan masyarakat pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana yang dilihat berdasarkan tahapan-tahapan pemberdayaan yang ada. Selain itu, juga untuk melihat faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan pemberdayaan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana.

Situs penelitian ini adalah Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri dari Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, pengurus dan anggota Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana, serta Masyarakat Pesisir Sekitar Kecamatan Juwana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, situs internet, dan berbagai referensi lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilaksanakan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, yang selanjutnya dilengkapi dengan analisis domain. Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana

Pemberdayaan masyarakat pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana diuraikan melalui tiga tahapan, yakni tahap penumbuhan kesadaran dalam diri masyarakat nelayan, peningkatan kapasitas individu dan kelompok nelayan sebagai penunjang keberdayaan,

serta peningkatan keberdayaan yang berkelanjutan.

1. Penumbuhan kesadaran dalam diri masyarakat nelayan

Tahap penumbuhan kesadaran merupakan langkah awal yang krusial bagi masyarakat nelayan pemilik kapal karena menentukan sejauh mana mereka mampu memahami, menerima, serta terlibat secara aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Dalam konteks Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana, tahap ini menjadi fondasi utama bagi keberhasilan program pemberdayaan, mengingat nelayan pemilik kapal merupakan aktor sentral dalam menjaga keberlanjutan usaha perikanan. Pola pemberdayaan bersifat *bottom up*, Paguyuban MNS Juwana terbentuk melalui inisiatif nelayan pemilik kapal secara mandiri.

Tahapan penumbuhan kesadaran dalam diri masyarakat nelayan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana berkaitan dengan tiga proses yang menyertainya, meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan (Suwandi & Prihatin, 2020). Dalam

tahapan penumbuhan kesadaran pada proses pengetahuan, secara umum pendiri dan beberapa anggota yang bergabung di awal pembentukan Paguyuban MNS Juwana sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan atau ancaman yang mereka hadapi di bidang usaha perikanan tangkap.

Mereka juga sudah mampu menganalisis permasalahan berdasarkan dari pengalaman yang dimiliki dan cara penyelesaian dari permasalahan tersebut melalui diskusi bersama. Berdasarkan analisis yang dilakukan Didik Mardiyono bersama rekan sesama nelayan pemilik kapal *purse seine* di Bendar, ditemukan bahwa inkonsistensi kebijakan pemerintah berdampak terhadap keberlangsungan bisnis usaha perikanan tangkap yang mereka jalankan.

Melalui diskusi bersama nelayan pemilik kapal *purse seine* di Desa Bendar mendorong gagasan pembentukan Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana atas kebutuhan akan wadah yang

menaungi dan mengakomodasi kepentingan anggota, terutama dalam hal memengaruhi kebijakan pemerintah di bidang usaha perikanan tangkap.

Sementara itu, sikap anggota menunjukkan bahwa seluruh anggota menanggapi diskusi dengan menyampaikan pendapat, menerima dan menghargai keputusan, serta melaksanakan hasil keputusan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap organisasi. Proses tindakan, persepsi dan respons yang dimiliki anggota Paguyuban MNS Juwana terkait kelompoknya termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara umum dijawab secara positif oleh anggota, diwujudkan melalui keterlibatan secara aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan.

Keterlibatan anggota dalam pembentukan organisasi, diskusi, dan kegiatan rutin tahunan mencerminkan tindakan atau perilaku terbuka yang merespons permasalahan dengan praktik nyata (Rachmawati, 2019). Komunitas ini telah berhasil mengumpulkan

nelayan pemilik kapal *purse seine* dengan visi dan tujuan yang sama untuk menjaga keberlangsungan bisnis usaha perikanan tangkap dari inkonsistensi kebijakan pemerintah melalui pemberdayaan.

Namun, belum sepenuhnya berhasil untuk meningkatkan keterlibatan anggota secara aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Kondisi tersebut muncul sebab anggota cenderung bergantung terhadap peran pengurus.

2. Peningkatan kapasitas individu dan kelompok sebagai penunjang keberdayaan

Peningkatan kapasitas di Paguyuban MNS Juwana diarahkan pada penguatan aspek bisnis usaha perikanan tangkap. Fokus ini relevan dengan kebutuhan riil nelayan pemilik kapal *purse seine* sebagai pelaku usaha yang memerlukan kompetensi memadai dalam mengelola usaha, khususnya dalam menghadapi kompleksitas regulasi, perizinan, serta kewajiban perpajakan dan retribusi daerah.

Tahap peningkatan kapasitas terbagi menjadi tiga jenis, yakni peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas organisasi, dan peningkatan kapasitas sistem nilai (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Peningkatan kapasitas individu dalam pemberdayaan di Paguyuban MNS Juwana dilakukan secara mandiri melalui upaya pemberian keterampilan dan pengetahuan anggota melalui diskusi dan edukasi, serta transfer pengetahuan yang diperoleh perwakilan pengurus dari pemerintah maupun komunitas lain.

Sementara peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dilakukan dengan membangun kerja sama lembaga sertifikasi pemerintah. Peningkatan kapasitas organisasi di Paguyuban MNS Juwana dilakukan melalui penguatan komunikasi, khususnya dengan pemerintah melalui diskusi, lobi, dan negosiasi terkait regulasi dan kebijakan di sektor perikanan tangkap. Penguatan komunikasi internal telah berjalan dengan baik, tetapi masih didominasi oleh perwakilan pengurus Paguyuban MNS Juwana.

Upaya membangun harmoni sistem nilai dengan pemberdayaan menjadi langkah penting untuk mendorong keberhasilan pemberdayaan (Suwandi & Prihatin, 2020). Paguyuban MNS Juwana menynergikan nilai-nilai yang dibawa anggota dalam kegiatan pemberdayaan, berupa nilai kebersamaan, kerja sama, keadilan, dan musyawarah untuk mufakat.

Paguyuban MNS Juwana meningkatkan kapasitas baik secara individu maupun kelembagaan dengan tujuan agar organisasi mampu menjawab permasalahan terkait usaha perikanan tangkap yang dihadapi baik saat ini maupun di masa mendatang.

3. Peningkatan keberdayaan yang berkelanjutan

Peningkatan keberdayaan menjadi langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, di mana nelayan pemilik kapal *purse seine* diarahkan untuk memiliki kesadaran dan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan dalam dinamika sosial, ekonomi, maupun kebijakan yang memengaruhi bisnis

mereka. Melalui peningkatan keberdayaan diharapkan mencapai kemandirian dalam tiga aspek, antara lain aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial (Suwandi & Prihatin, 2020).

Peningkatan keberdayaan dalam aspek politik dalam pemberdayaan di Paguyuban MNS Juwana ditandai dari keberhasilan proses advokasi kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dapat diamati dari anggota yang sudah berani memberi masukan dalam forum diskusi internal. Selain itu, keberanian juga tercermin dari pengambilan keputusan bersama dalam jejaring aspirasi anggota dan pengurus Paguyuban MNS Juwana terkait perumusan kebijakan perikanan tangkap, guna diajukan sebagai masukan dan saran kepada pemerintah pusat. Paguyuban MNS Juwana sebagai komunitas nelayan pemilik kapal telah memiliki posisi tawar yang cukup kuat, dilihat dari kemampuan memengaruhi kebijakan melalui kelembagaan resmi.

Peningkatan keberdayaan ekonomi di Paguyuban MNS Juwana sebagaimana terlihat dari kemandirian mengelola sumber daya dan berbagai pengembangan berdampak secara tidak langsung pada peningkatan kondisi ekonomi anggota. Aspek ekonomi ini justru dirasakan oleh masyarakat di luar Paguyuban MNS Juwana yang memperoleh manfaat dari program CSR yang dilakukan anggota.

Aspek sosial seperti kepercayaan dan solidaritas menjadi hal yang menonjol dalam tahap peningkatan keberdayaan yang dilakukan di Paguyuban MNS Juwana. Manifestasi aspek ini tampak dalam relasi pertemanan anggota di luar Paguyuban MNS, di mana terjadi praktik berbagi pengetahuan, keterampilan, serta pemberian masukan kepada sesama nelayan.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Paguyuban MNS Juwana telah mendorong kemandirian dan keberlanjutan yang tidak berhenti dalam sebuah periode waktu, tetapi diteruskan oleh generasi selanjutnya. Pembentukan Paguyuban MNS

Juwana tidak berorientasi pada peningkatan ekonomi secara eksplisit, tetapi advokasi kebijakan yang konsisten dilakukan organisasi untuk menjaga keberlangsungan usaha perikanan tangkap memberikan dampak secara tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan anggota.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Juwana

Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) adalah contoh nyata dari sebuah sistem sosial yang dinamis, di mana keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik faktor yang mendorong maupun faktor yang menghambat pemberdayaan.

a. Faktor Pendorong

1. Motivasi

Motivasi anggota merupakan fondasi awal yang menggerakkan terbentuknya kesadaran kolektif. Nelayan pemilik kapal *purse seine*

menyadari bahwa secara individu mereka memiliki keterbatasan dalam memengaruhi kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap usaha perikanan tangkap. Kesadaran ini melahirkan dorongan untuk membangun kekuatan bersama melalui paguyuban sebagai wadah kolektif.

Motivasi yang mendasari individu untuk bergabung dalam Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana dapat diindikasikan melalui adanya hasrat dan minat untuk bergabung, dorongan atas kebutuhan tertentu, harapan terhadap perubahan, serta keinginan memperoleh pengakuan atau penghormatan atas peran yang dilakukan (Margayaningsih, 2018).

Dorongan internal berkembang menjadi partisipasi dalam forum diskusi, rapat anggota tahunan (RAT), serta komunikasi internal organisasi. Meskipun motivasi anggota di Paguyuban MNS Juwana telah terbentuk sejak awal bergabung dan berakar pada kepentingan untuk menjaga keberlangsungan usaha perikanan tangkap, dalam praktiknya

tingkat partisipasi belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, keikutsertaan anggota dalam diskusi, kegiatan rutin, maupun program pemberdayaan lainnya sebagian besar masih bergantung pada dorongan, ajakan, dan inisiatif dari pengurus.

2. Anggaran

Pemberdayaan di Paguyuban MNS Juwana juga didorong oleh adanya anggaran yang mencukupi kebutuhan program. Paguyuban MNS Juwana memiliki sistem pendanaan internal yang bersumber dari iuran anggota dan pengurus, hal ini menunjukkan tingkat kemandirian finansial tanpa ketergantungan pada bantuan pemerintah. Stabilitas finansial di Paguyuban MNS Juwana memungkinkan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan, seperti diskusi rutin, kegiatan edukasi, hingga aktivitas sosial, berjalan secara konsisten.

Ketersediaan dana yang memadai memberikan fleksibilitas organisasi dalam merespons kebutuhan anggota

secara cepat, terutama ketika menghadapi dinamika kebijakan di sektor perikanan tangkap. Adanya dukungan finansial yang stabil memungkinkan paguyuban mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan yang bersifat strategis, termasuk penguatan kapasitas anggota. Peningkatan kapasitas anggota Paguyuban MNS Juwana sangat bergantung pada anggaran yang dimiliki.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Paguyuban MNS Juwana merupakan suatu keunggulan yang harus dimanfaatkan dalam pemberdayaan. Sarana dan prasarana tidak hanya dimaknai sebagai fasilitas fisik, tetapi juga aspek kelembagaan dan sumber daya manusia yang mendukung keberlangsungan organisasi. Pengurus dan anggota yang aktif dalam diskusi dan kegiatan edukasi menjadi modal utama pemberdayaan. Kapasitas komunikasi yang dimiliki oleh pengurus, khususnya dalam menjembatani aspirasi anggota

dengan pemerintah, memperkuat fungsi advokasi paguyuban.

Sarana dan prasarana lain seperti halnya struktur organisasi memperkuat koordinasi dan pembagian peran secara jelas. Unsur ini memperjelas tanggung jawab masing-masing pengurus dan peran anggota sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dapat berjalan lebih terarah. Pemanfaatan sarana dan prasarana gedung sekretariat memperkuat identitas kelembagaan sekaligus menciptakan ruang partisipatif yang mendukung interaksi dan pertukaran gagasan antaranggota.

Selain melakukan kegiatan secara luring, Paguyuban MNS Juwana juga mengandalkan komunikasi secara daring melalui grup WhatsApp pengurus dan anggota yang mendorong penyebaran informasi dan mengurangi kesenjangan komunikasi antara anggota di wilayah Kabupaten Pati dan anggota di daerah luar Kabupaten Pati. Sarana dan prasarana di Paguyuban MNS Juwana berfungsi sebagai

fondasi struktural dan operasional yang memperkuat proses pemberdayaan.

b. Faktor Penghambat

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan faktor eksternal yang secara signifikan memengaruhi dinamika pemberdayaan masyarakat pesisir di Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan di sektor perikanan tangkap khususnya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat berfungsi sebagai faktor penghambat ketika tidak selaras dengan kondisi riil dan kepentingan ekonomi nelayan pemilik kapal.

Pemberdayaan ini atas inisiatif nelayan pemilik kapal sehingga tidak memiliki peraturan atau perundang-undangan yang mengatur keberjalanan program. Paguyuban MNS Juwana lahir sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang adaptif. Perubahan regulasi kerap terjadi seiring pergantian pimpinan dan dinamika

birokrasi menimbulkan ketidakpastian usaha bagi nelayan.

Regulasi dipandang sebagai intervensi yang mengganggu stabilitas bisnis, memunculkan ketidakpercayaan yang berpotensi melemahkan kolaborasi. Meskipun hasil penelitian juga menunjukkan adanya fungsi protektif dari kebijakan tertentu, seperti pengaturan batas teritorial penangkapan dan penindakan terhadap kapal asing. Namun, kebijakan dan peraturan dari pemerintah lebih menonjolkan aspek ketidakpastian dan perubahan dinamis yang menghambat pemberdayaan di Paguyuban MNS Juwana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis telah menunjukkan bahwa Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera (MNS) Juwana adalah salah satu kelompok masyarakat nelayan pemilik kapal *purse seine* yang mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara mandiri dan berkelanjutan dilihat dari perkembangan dari waktu ke waktu dan kebermanfaatannya yang dihasilkan.

Pemberdayaan yang dilaksanakan sudah memenuhi beberapa aspek dari pemberdayaan, yakni penumbuhan kesadaran dalam diri masyarakat nelayan, peningkatan kapasitas individu dan kelompok nelayan sebagai penunjang keberdayaan, serta peningkatan keberdayaan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan yang dilakukan sejauh ini masih cenderung bersifat elitis di antara anggota Paguyuban MNS Juwana. Namun, dampak positif yang dihasilkan Paguyuban MNS Juwana dapat dirasakan oleh mereka yang berada di luar keanggotaan. Pemberdayaan yang dilakukan Paguyuban MNS Juwana secara tidak langsung dapat membawa kesejahteraan bagi anggota.

SARAN

- a. Paguyuban MNS Juwana perlu menyusun dan mengadakan program pemberdayaan yang lebih sistematis untuk meningkatkan keterlibatan anggota secara aktif, seperti kegiatan sosialisasi atau pelatihan

yang berorientasi kuat pada peningkatan ekonomi anggota.

- b. Perlu dilakukan kaderisasi atau pelibatan anggota dalam forum komunikasi, diskusi, maupun advokasi dengan pemerintah.
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan disarankan merancang skema pemberdayaan yang juga mengakomodasi nelayan pemilik kapal skala menengah dan besar, mengingat mereka memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi perikanan nasional dan penyerapan tenaga kerja.
- d. Anggota perlu menumbuhkan kesadaran bahwa paguyuban merupakan wadah kolektif yang keberlanjutannya bergantung pada kontribusi seluruh anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 84–122.
- Databoks. (2024, 9 Oktober). 10 Negara Produsen Perikanan Tangkap Laut Terbesar 2022. <https://databoks.katadata.co.id/kelautan/statistik/6705ea0abc690>

/10-negara-produsen-perikanan-tangkap-laut-terbesar-2022.
Diunduh pada 13 Februari 2025
pukul 23.00 WIB.

- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). De La Macca.
- Heriza, B., & Mulianingsih, F. (2023). Peran Modal Sosial Dalam Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Tambak Lorok Semarang Utara. *Sosiolum*, 5(1), 41–52. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/SOSIOLIUM>
- Mardiyani, Y., & Yulianti, A. (2020). Analisis Pengaruh Sub Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 41–50. <https://doi.org/10.33019/equity.v%vi%i.47>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72–88. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/140>
- Nugroho, M. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Pasuruan: Kajian Pengembangan Model Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Di Wilayah Pesisir Pantai. *Jurnal Teknologi Pangan*, 6(1), 19–26.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Sa'idah, S. F., Ridlo, M. A., & Rahman, B. (2024). Kualitas Lingkungan Permukiman Nelayan di Koridor Sungai Silugonggo, Desa Bendar, Kecamatan Juwana. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(2), 190–199.
- Suwandi, M. A., & Prihatin, S. D. (2020). Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” di Jepara, Indonesia. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 231–255. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/index>
- Utama, S. J., & Wahyuni, S. (2016). *Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Hang Tuah University Press.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*. PT Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=PApyb4Uje2IC>
- Yulistiana, R. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Perpektif Komunikasi Kesehatan (I)*. Wiraraja Press.